

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu disiplin kerja, stres kerja, dan kepuasan kerja dengan subjek penelitian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berlokasi di Jl. Raya Tj. Barat No.1, RT.2/RW.1, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan stres kerja terhadap kepuasan kerja pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3.1.1 Logo Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Berikut merupakan logo Instansi Pertanahan di Jakarta Selatan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

3.1.2 Sejarah Singkat Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955 mendirikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Wilayah Republik Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1955. Pemerintah awalnya berpendapat bahwa urusan agraria bukanlah isu strategis yang memerlukan lembaga di bawah kementerian, sehingga sebelum menjadi kementerian pada tahun 1955, urusan agraria dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pada 24 September 1960, reformasi hukum pertanahan nasional ditolak. Pada hari itu, Undang-Undang Pokok Agraria yang diusulkan disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya UUPA, hukum nasional yang bersumber dari hukum adat digunakan untuk pertama kalinya dalam pengaturan tanah di Indonesia. Ini berarti Agrarische Wet dicabut dan tidak berlaku lagi. Hukum agraria Indonesia berakhir pada tahun 1960.

Pada tahun 1964, Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964 menetapkan fungsi, struktur, dan pimpinan Departemen Agraria. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965, yang memasukkan Direktorat Transmigrasi dan Kehutanan ke dalam organisasi. Selama periode ini, Kantor Inspeksi Pertanian digabungkan dengan Departemen Dalam Negeri, Direktorat Tata Bumi digabungkan dengan Departemen Pertanian, dan Kantor Pendaftaran Tanah digabungkan dengan Departemen Kehakiman.

Untuk alasan kelembagaan, Departemen Agraria kembali menjadi Direktorat Jenderal pada tahun 1965. Hanya saja, pada tahun itu, ditambahkan Direktorat Bidang Transmigrasi, dan dikenal sebagai Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi,

yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Pemerintah Orde Baru melakukan peningkatan ini untuk meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan sistem. Namun, pada tahun yang sama terjadi perubahan organisasi yang signifikan, sehingga struktur ini tidak bertahan lama. Sementara masalah transmigrasi dipindahkan ke Departemen Veteran, Transmigrasi, dan Koperasi, Direktorat Jenderal Agraria tetap berstatus Direktorat Jenderal dan masih merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri.

Pada tahun 1972, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1969 dicabut dan digantikan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1972. Keputusan ini mengatur persatuan instansi agraria di seluruh daerah. Di tingkat provinsi, terdapat Kantor Direktorat Agraria Provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota, terdapat Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya.

Pada tahun 1988, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional diterbitkan. Tahun ini merupakan tahun bersejarah. Seiring dengan pertumbuhan pembangunan nasional yang menjadi fokus utama proyek ekonomi-politik Orde Baru, permintaan akan tanah juga semakin meningkat. Masalah yang dihadapi Direktorat Jenderal Agraria semakin sulit dan menantang. Untuk mengatasi masalah tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang disebut Badan Pertanahan Nasional. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas-tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan secara bersamaan oleh Menteri Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang yang menjabat sebagai Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Menteri Negara Agraria lebih fokus pada kebijakan berbasis koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih fokus pada kebijakan berbasis operasional.

Selama masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, Kementerian Agraria dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia juga menjabat sebagai kepala Badan Pertanahan Nasional. Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab atas pengelolaan tanah secara harian.

Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Struktur Organisasi, dan Prosedur Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, serta Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Tanah, yang menempatkan Badan Pertanahan Nasional BPN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan tanah nasional. Posisi Badan Pertanahan Nasional BPN semakin diperkuat selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang menempatkan BPN RI langsung di bawah tanggung jawab Presiden.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, lembaga-lembaga agraria diperkuat kembali dengan menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan badan pemerintah yang menangani perencanaan penggunaan lahan, perencanaan kehutanan, dan planologi. Penggabungan struktur ini disertai dengan penjelasan mengenai tugas dan fungsi Kementerian Agraria, yang sebenarnya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Urusan Agraria Dasar, sesuai dengan semangat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

3.1.3 Tujuan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

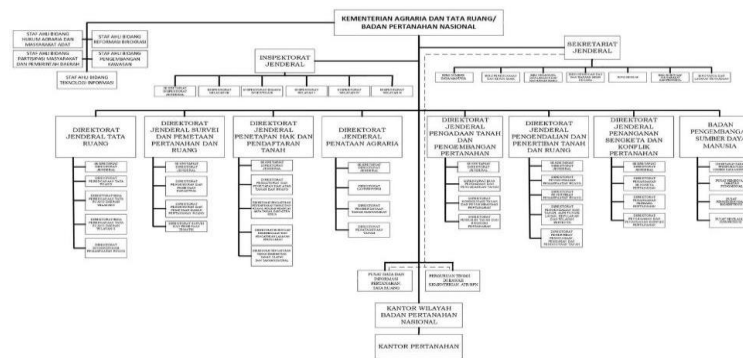
Berikut merupakan tujuan Instansi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan sebagai berikut:

- Visi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
- Misi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanian yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan; Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.
- Moto Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah Melayani, Profesional, Terpercaya.

3.1.4 Struktur Organisasi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional

Berikut merupakan struktur organisasi pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Jakarta Selatan

Sumber : Kantor Pertanahan Jakarta Selatan

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dalam penggunaan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2019:2).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan metode survei sebagai metode utama dalam pengumpulan data penelitian. Metode survei merupakan suatu metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk memperoleh data yang telah terjadi di masa lalu atau saat ini. Mengenai keyakinan, pendapat, ciri-ciri, perilaku, hubungan variabel untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik untuk mendapatkan data menggunakan observasi (wawancara atau kuesioner) tidak

mendalam dan hasil penelitian cenderung bersifat generalisasi (Sugiyono, 2019:56)

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan suatu objek secara nyata, dengan meneliti satu variabel secara mandiri tanpa melakukan perbandingan dengan variabel lain (Sugiyono, 2019:7-8)

Metode verifikatif merupakan metode penelitian yang bersifat pembuktian. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2019:8)

Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menggambarkan serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019:15)

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan suatu karakteristik atau sifat atau nilai dari orang, objek kegiatan yang memiliki variabel tertentu yang ditentukan oleh penulis untuk dipelajari dan selanjutnya diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2019:68). Sesuai dengan judul penelitian yang ditetapkan. Maka terdapat tiga variabel yang terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2019:69). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu Disiplin Kerja (X₁), Stres Kerja (X₂).

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi dampak, karena ada variabel bebas (Sugiyono, 2019:69). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu Kepuasan Kerja (Y).

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Ukuran	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Disiplin Kerja (X ₁)	Disiplin kerja merupakan rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.	1. Frekuensi Kehadiran	• Ketepatan jam masuk dan pulang kerja • Konsistensi Kehadiran	O R D I N A L
		2. Tingkat Kewaspadaan	• Ketelitian dalam menyelesaikan tugas	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			• Kepatuhan terhadap prosedur K3	
		3. Ketaatan Pada Standar Kerja	• Kesesuaian cara kerja dengan prosedur yang berlaku	
		4. Ketaatan Peraturan Kerja	• Kepatuhan pada tata tertib	
		5. Etika Kerja	• Kesesuaian pakaian dengan aturan • Sikap profesional	
Stres Kerja (X ₂)	Stres kerja merupakan suatu ketegangan yang mengakibatkan tidak seimbangnya kondisi psikologis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diakibatkan terlalu banyak tuntutan dan tekanan yang berlebihan dari tugas yang diberikan.	1. Kekhawatiran 2. Gelisah 3. Tekanan	• Kekhawatiran terhadap beban kerja • Keraguan kemampuan • Ketidaknyaman emosional • Gejala fisik menghadapi deadline • Merasa tertekan secara	O R D I N A L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			emosional saat bekerja	
			• Rasa tertekan akibat konflik antara tugas dan kemampuan	
		4. Frustrasi	• Kekecewaan hasil • Hambatan sistem	
Kepuasan Kerja (Y)	Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan akan merasa puas dengan adanya kesesuaian antara kemampuan, keterampilan dan harapannya dengan pekerjaan yang harus di hadapi.	1. Gaji	• Kelayakan • Adil • Ketepatan waktu pembayaran	
		2. Pekerjaan itu sendiri	• Pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan • Beban kerja • Fleksibilitas dalam menyelesaikan pekerjaan	

O
R
D
I
N
A
L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Rekan Kerja	• Hubungan dengan rekan kerja • Dukungan rekan kerja	
		4. Atasan	• Atasan memberikan motivasi • Menghargai masukan pegawai	
		5. Promosi	• Pengembangan Kemampuan	O R D I N A L
		6. Lingkungan kerja	• Fasilitas pekerjaan • Kondisi ruang pekerjaan	

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan jenis penelitian yang akan dilakukan.

3.2.3.1 Jenis dan Sumber Data

Berikut jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung untuk dikirimkan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019:194). Data primer ini dilakukan dengan cara

penyebaran kuesioner kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung untuk dikirimkan kepada pengumpul data, dalam arti melalui media sebagai perantara atau dokumen (Sugiyono, 2019:194). Data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel jurnal, buku, situs publikasi pemerintah, sejarah instansi, profil instansi, jumlah pegawai, serta sumber lainnya.

3.2.3.2 Populasi Sasaran

Populasi merupakan keseluruhan jumlah yang mencakup objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi tidak hanya orang, tetapi populasi juga berupa objek dan benda-benda alam lain yang meliputi semua karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut (Sugiyono, 2019:126). Dalam penelitian ini, populasinya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang jumlahnya 86 orang pegawai.

3.2.3.3 Penentuan Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sensus atau sampling total adalah teknik pengembalian sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Penelitian yang dilakukan pada populasi di bawah 100 sebaiknya dilakukan dengan sensus,

sehingga seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sampel semua sebagai subyek yang dipejari atau sebagai responden pemberi informasi (Sugiyono, 2019:127). Istilah lain sensus merupakan sampel jenuh, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi dijadikan sampel, yaitu seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berjumlah 86 orang.

3.2.3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran informasi atau ide, antara dua orang melalui tanya jawab. Wawancara merupakan teknik yang digunakan ketika peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono, 2019:304). Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan secara langsung dengan kepala seksi dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

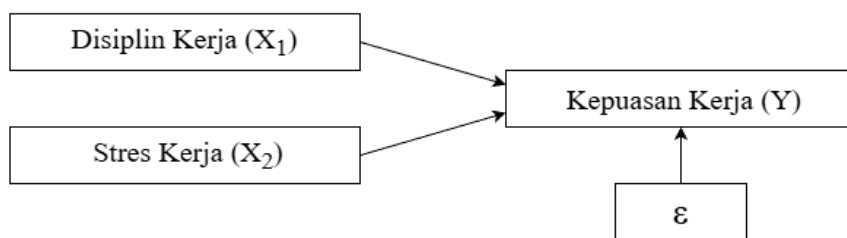
2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk di jawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2019:199). Kuesioner dalam penelitian ini berhubungan dengan disiplin kerja dan stres kerja dengan memberikan beberapa pertanyaan secara tertulis kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3.2.4 Model Penelitian

Pola hubungan antar variabel yang akan diteliti disebut sebagai model penelitian atau paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis serta teknik analisis statistik yang digunakan (Sugiyono, 2019:72) Untuk mengetahui gambaran umum mengenai Pengaruh Disiplin kerja dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja. Maka disajikan model penelitian berdasarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 3.3 Model Penelitian

Keterangan:

ε = Faktor lain yang tidak diteliti.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari seluruh responden akan dikelompokkan berdasarkan variabel dan jenis responden, kemudian mentabulasi data berdasarkan variabel. Data dari setiap variabel akan dihitung untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun dan dilakukan pengujian hipotesis yang sudah diajukan (Sugiyono, 2019:206).

3.2.5.1 Uji Instrumen

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan sebelum melakukan analisis dan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur secara akurat objek atau konsep yang hendak diukur. Tujuan dari uji ini untuk memastikan bahwa setiap butir dalam instrumen penelitian benar-benar dapat mempresentasikan faktor yang ingin diukur serta menunjukkan konsistensi internal antar item dalam mengukur faktor tersebut (Sugiyono, 2019:175).

Prosedur uji validitas yaitu membandingkan r hitung dengan r tabel yaitu angka kritik tabel korelasi dengan $df = n-2$ dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ maka:

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut valid.

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk memastikan bahwa instrumen peneliti mempunyai tingkat keandalan yang memadai hingga layak digunakan untuk alat pengumpulan data. Tujuan dari pengujian ini untuk menilai sejauh mana instrumen tersebut mampu mengukur fenomena yang sama secara konsisten, pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan *cronbach alpha* (Sugiyono, 2019:175). Suatu indikator bisa dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha* $\geq 0,60$. Sedangkan apabila *cronbach alpha* $\leq 0,60$ maka indikator tidak reliabel.

3.2.5.2 Analisis Deskriptif

Dalam analisis deskriptif, data yang terkumpul akan dirangkum sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan data tersebut, seperti frekuensi, mean, standar deviasi maupun rankingnya. Bobot jawaban dari responden ditentukan menggunakan Skala Likert (1-5). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Format Nilai, Notasi dan Predikat Untuk Pernyataan Positif

Nilai	Keterangan	Notasi	Predikat
5	Sangat Setuju	SS	Sangat Tinggi
4	Setuju	S	Tinggi
3	Netral	N	Cukup
2	Tidak Setuju	TS	Rendah
1	Sangat Tidak Setuju	STS	Sangat Rendah

Sumber: (Sugiyono, 2019)

Tabel 3.3 Format Nilai, Notasi dan Predikat Untuk Pernyataan Negatif

Nilai	Keterangan	Notasi	Predikat
1	Sangat Setuju	SS	Sangat Tinggi
2	Setuju	S	Tinggi
3	Netral	N	Cukup
4	Tidak Setuju	TS	Rendah
5	Sangat Tidak Setuju	STS	Sangat Rendah

Sumber: (Sugiyono, 2019)

Perhitungan hasil kuesioner dengan presentase dan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Jumlah presentase jawaban

F = Jumlah jawaban/frekuensi

N = Jumlah responden

Setelah diketahui jumlah nilai dari keseluruhan sub variabel dari hasil perhitungan, maka dapat ditentukan intervalnya dengan rumus:

$$NJI = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pernyataan}}$$

Keterangan:

NJI = Interval Interval untuk menentukan klasifikasi penilaian.

Kriteria Pernyataan = Untuk menentukan klasifikasi penilaian.

3.2.5.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan dengan mengetahui bahwa data terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas dan heteroskedastisitas diantara variabel yang menjelaskan dalam model regresi (Ghozali, 2018:109), maka dilakukan Uji Asumsi Klasik sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018:161). Model regresi yang baik adalah terdistribusi normal atau mendekati normal. *Kolmogorov Smirnov* (K-S) digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan cara melihat pada baris Asymp. Sig (2-tailed). dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Namun apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2018:107) untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi dapat diketahui sebagai berikut:

a. *Nilai tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF)

Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka model regresi tersebut bebas dari masalah multikolinearitas.

b. Mengkorelasikan antara variabel independen

Apabila memiliki korelasi yang sempurna (dengan nilai $> 0,8$) maka terjadi masalah pada multikolinearitas, demikian pula sebaliknya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

b. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.2.5.4 Metode *Successive Interval*

Pada penelitian ini mengubah skala ordinal menjadi skala interval menggunakan Metode *Successive Interval*. Skala likert jenis ordinal hanya menunjukkan rankingnya saja. Karena, variabel yang berskala ordinal terlebih dahulu ditransformasikan menjadi data yang berskala interval.

3.2.5.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independen variabel Disiplin Kerja (X_1), Stres Kerja (X_2) terhadap dependen variabel Kepuasan Kerja (Y) dengan menggunakan model persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepuasan Kerja

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Disiplin Kerja

X_2 = Stres Kerja

e = *Error* (Kesalahan)

3.2.5.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien antara nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97)